

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggung jawab pendidikan. Hal ini dipertegas dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3, yang menyatakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menyadari hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan bagi peningkatan kualitas pendidikan, termasuk dalam hal penyempurnaan sistem pendidikan. Upaya tersebut antara lain dengan melakukan pergeseran paradigma pengelolaan sistem pendidikan dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini secara implisit dinyatakan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang diberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2001, bahwa pendidikan merupakan salah satu

bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota (pasal 11 ayat 2), dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sejak digulirkannya otonomi daerah, pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan segala bidang kehidupan, termasuk di dalam bidang pendidikan. Desentralisasi pendidikan menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah, yang menempatkan kabupaten/kota sebagai titik berat desentralisasi. Pergeseran kewenangan ini berkaitan erat dengan fokus perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di era otonomi daerah ini adalah dengan diterapkannya konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam menyikapi kebijakan desentralisasi dalam bidang pendidikan ini, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan No. 420/Kep. 2556-Disdik/2001 tentang penerapan MBS di Jawa Barat. Adanya Surat Keputusan (SK) tersebut merupakan salah satu kebijakan strategis Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di tingkat satuan pendidikan (sekolah).

Secara konseptual, Manajemen Berbasis Sekolah merupakan salah satu model manajemen pendidikan yang berbasis pada kemandirian sekolah dan aparat daerah dalam menentukan arah, kebijakan, serta jalannya pendidikan di

daerah masing-masing. Selain itu, implementasi MBS mengandung misi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat luas selain orang tua, dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional institusi sekolah. Oleh karena itu, diperlukan kontribusi nyata dari seluruh perangkat yang ada dalam konsep Manajemen Berbasis Sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah yang bersangkutan. Model pengelolaan sekolah seperti ini pun memiliki potensi yang besar untuk menciptakan personil sekolah (kepala sekolah, guru, dan staf) yang profesional, sehingga sekolah akan lebih bersifat responsif terhadap kebutuhan masing-masing siswa dan masyarakat. Kegagalan dalam implementasi MBS akan menghambat tercapainya misi desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah, sehingga otonomi pendidikan akan berdampak kurang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan program pendidikan secara makro.

Seperti yang dikemukakan oleh Dit. PLP Dikdasmen (2001), beberapa alasan mendasar diterapkannya MBS adalah sebagai berikut:

1. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan bagi dirinya, sehingga sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolah.
2. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya *input* pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
3. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya.
4. Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efektif dan efisien bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat.
5. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat.
6. Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, peserta didik, dan masyarakat umum,

sehingga sekolah akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan.

7. Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain dengan cara meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya inovatif berupa dukungan orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat.
8. Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat.

Tuntutan perlunya penerapan MBS semakin nyata seiring dengan perubahan karakteristik masyarakat. Perubahan dalam lingkungan sosial, politik, ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan secara nasional, regional, maupun global mendorong adanya perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki siswa sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat luas di masa mendatang. Oleh karena itu, program pengajaran dan layanan jasa yang diberikan kepada siswa harus sesuai dengan tuntutan baru tersebut.

Sejalan dengan upaya reformasi pendidikan nasional melalui MBS, hubungan antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat pun perlu direformasi, sehingga tanggung jawab pendidikan bukan hanya dibebankan pada sekolah. Hal ini sejalan dengan pendapat Shields (1994) yang menyatakan bahwa:

Reformasi pendidikan harus sampai pada hubungan antara sekolah dengan keluarga, dan sekolah dengan masyarakat dengan cara melibatkan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah, baik yang terkait langsung dengan kegiatan pembelajaran maupun non instruksional.

Dengan demikian, mengingat pentingnya partisipasi seluruh warga sekolah dan masyarakat dalam memajukan pendidikan di sekolah, maka sebagai konsekuensi dalam mengakomodasi aspirasi, harapan dan kebutuhan

pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap sekolah tersebut perlu dikembangkan adanya wadah (lembaga) untuk menampung dan menyalurkannya. Wadah tersebut berfungsi sebagai forum, di mana representasi para *stakeholders* sekolah terwakili secara proporsional. Dalam implementasi MBS, wadah ini disebut dengan komite sekolah.

Keberadaan komite sekolah sangat diperlukan dalam rangka mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah. Ini artinya, bahwa peran masyarakat sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, Pasal 56 Ayat 3, bahwa:

Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Dengan demikian, dukungan masyarakat dalam hal ini komite sekolah mempunyai peranan penting dalam pengembangan kualitas pendidikan dengan membantu pihak sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, serta evaluasi program sekolah, sehingga akan terjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas sekolah.

Komite sekolah merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat luas yang terdiri dari unsur-unsur orang tua siswa, wakil siswa, wakil guru, kepala sekolah, wakil tokoh masyarakat setempat (ulama, budayawan, pemuka adat, dan cendikia pemerhati pendidikan), wakil masyarakat terinstitusi (lurah, camat dan pejabat lainnya yang ada di wilayah sekolah), dan utusan pejabat pendidikan (Dinas Pendidikan).

Adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam pengelolaan sekolah diharapkan dapat mengurangi beban pemerintah, terutama yang lebih penting adalah menyangkut pengelolaan keuangan sekolah. Hal ini dianggap penting karena masalah pembiayaan pendidikan (sekolah) sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Untuk itu, diperlukan adanya pengelolaan pembiayaan pendidikan yang baik dan profesional sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Di mana, ini merupakan tugas bagi pihak sekolah dan komite sekolah dalam rangka mewujudkan demokrasi dan transparansi.

Komite sekolah mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dalam peraturan tersebut, tersirat pula ketentuan mengenai keikutsertaan komite sekolah dalam pengelolaan keuangan sekolah. Atas dasar tersebut, maka komite sekolah perlu melakukan pengelolaan keuangan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan yang diperoleh dari bantuan masyarakat dan atau orang tua siswa untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Hal ini baik dalam penerimaan, penggunaan, pengawasan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban melalui kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku.

Dengan dilatarbelakangi permasalahan di atas, serta mengingat pentingnya peran komite sekolah akan kelancaran pengelolaan sekolah, maka peneliti merasa tertarik untuk mengetahui sejauh mana komite sekolah mempunyai kontribusi terhadap pengelolaan keuangan sekolah, mulai dari

perencanaan/penyusunan anggaran, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi hingga pada pertanggungjawaban keuangan sekolah. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan berjudul: “Kontribusi Kinerja Komite Sekolah terhadap Pengelolaan Keuangan Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung.”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Agar permasalahan yang akan dibahas tidak terlampaui luas ruang lingkungannya dan mampu memperoleh kejelasan mengenai masalah yang akan diteliti, maka masalah tersebut diuraikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran mengenai kinerja komite sekolah pada SMP Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung?
2. Bagaimana gambaran mengenai pengelolaan keuangan sekolah pada SMP Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung?
3. Bagaimana gambaran mengenai kontribusi kinerja komite sekolah terhadap pengelolaan keuangan sekolah pada SMP Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara jelas dan mendapatkan fakta mengenai

kontribusi kinerja komite sekolah terhadap pengelolaan keuangan sekolah pada SMP Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung.

## 2. Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui gambaran secara jelas mengenai kinerja komite sekolah pada SMP Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- b. Untuk mengetahui gambaran secara jelas mengenai pengelolaan keuangan sekolah pada SMP Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- c. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi kinerja komite sekolah terhadap pengelolaan keuangan sekolah pada SMP Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung

## D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan (Sugiyono, 2005: 327). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pengembangan dunia pendidikan, khususnya bagi peneliti. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Melalui proses penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kajian disiplin ilmu Administrasi Pendidikan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumber masukan yang sangat berarti bagi kepala sekolah dan komite sekolah di setiap SMP Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung.
3. Penelitian ini dapat mengungkapkan masalah yang aktual dan faktual mengenai kontribusi kinerja komite sekolah terhadap pengelolaan keuangan sekolah pada SMP Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung.
4. Dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

#### **E. ANGGAPAN DASAR**

Winarno Surakhmad (Suharsimi, 2002: 58) mengemukakan bahwa: “Anggapan dasar atau postulat adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik”. Anggapan dasar ini menjadikan titik pangkal di mana tidak ada lagi keraguan bagi peneliti. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka anggapan dasar dalam penelitian ini adalah:

1. Komite sekolah merupakan suatu forum resmi untuk mengakomodir dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan lembaga sekolah serta berfungsi sebagai wadah dari para *stakeholder* dalam menjalankan tugasnya untuk membantu sekolah meningkatkan kinerjanya bagi terwujudnya layanan pendidikan dan hasil belajar yang bermutu.
2. Komite sekolah merupakan perwujudan partisipasi seluruh peran masyarakat dalam pendidikan. Paradigma yang dibangun adalah masyarakatlah yang menjadi pengelola, penyelenggara, sampai pengontrol

sistem pendidikan di sekolah (Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2004: 112).

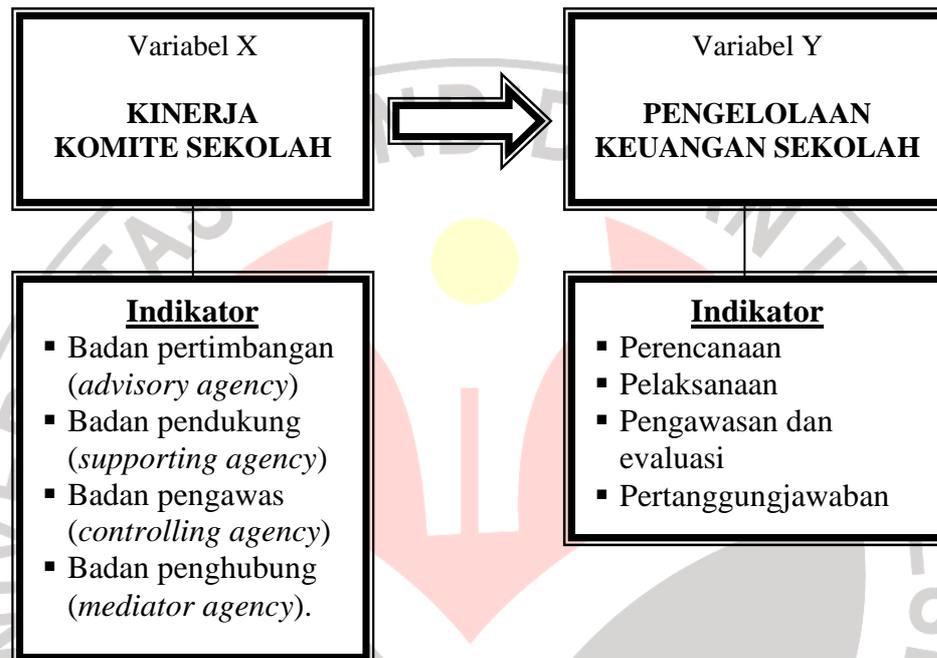
3. Keuangan dan pembiayaan sangat menentukan ketercapaian tujuan pendidikan di sekolah, yang mana memerlukan sejumlah investasi dari anggaran pemerintah dan dana masyarakat. Oleh karena itu, investasi tersebut harus dikelola secara efektif dan efisien.
4. Kewenangan pengelolaan keuangan terkait dengan pembiayaan pendidikan yang diperoleh dari bantuan masyarakat atau orang tua siswa untuk kepentingan pembelajaran harus menjadi bagian dari tanggung jawab komite sekolah (Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2004: 100).

#### **F. HIPOTESIS PENELITIAN**

Sugiyono (2005: 70) mengemukakan bahwa: “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.” Pendapat lain mengatakan bahwa hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan (Nana Sudjana, 1991: 37).

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: “Terdapat kontribusi yang positif dan signifikan antara kinerja komite sekolah terhadap pengelolaan keuangan sekolah pada SMP Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung.”

Kinerja komite sekolah merupakan variabel bebas (X), sedangkan pengelolaan keuangan sekolah merupakan variabel terikat (Y). Hubungan antara kedua variabel penelitian tersebut dipetakan dalam bagan sebagai berikut:



**Gambar 1.1**  
**Hubungan Antara Variabel X terhadap Variabel Y**

Keterangan:

 : Keterkaitan antara kinerja komite sekolah (variabel X) dengan pengelolaan keuangan sekolah (variabel Y)

## G. METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

### 1. Metode penelitian

Penelitian memerlukan suatu metode untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dan ditunjang oleh studi kepustakaan. Metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang berusaha untuk dapat menggambarkan secara jelas tentang masalah atau kejadian yang sedang berlangsung pada saat sekarang. Pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang memungkinkan dilakukan pencatatan dan penganalisaan data hasil penelitian secara eksak dengan menggunakan perhitungan statistik. Sedangkan, studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang lebih jelas melalui pengkajian terhadap berbagai konsep atau teori yang dikemukakan oleh para ahli yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## **2. Teknik pengumpulan data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik komunikasi tidak langsung, yaitu dengan menggunakan angket tertutup, di mana setiap pertanyaan yang diajukan disertai dengan alternatif jawaban, sehingga responden hanya melakukan pilihan terhadap alternatif jawaban yang sesuai dengan pengalaman dan pengamatannya.

Untuk teknik komunikasi langsung peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, namun hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

## H. LOKASI, POPULASI, DAN SAMPEL PENELITIAN

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun lokasi yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah Pertama yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung dan berstatus negeri.

### 2. Populasi Penelitian

Populasi adalah objek penelitian yang berupa manusia, gejala, benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya. Sugiyono (2005 : 90) mengemukakan bahwa: “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.”

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, maka yang akan menjadi populasi dan berperan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah di tingkat SMP Negeri yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung.

### 3. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi (Suharsimi, 1998: 117).

Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. Teknik ini digunakan karena peneliti

menganggap bahwa sampel penelitian memiliki karakter yang sama atau homogen, dan juga untuk mengefisienkan waktu, tenaga, maupun dana karena objek yang akan diteliti sangat luas. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 26 kepala sekolah dari populasi sebanyak 52 kepala sekolah pada tingkat SMP Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung.

